

**PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL  
DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEAMANAN HUTAN**

(Studi Kasus Di RPH Wangun, BKPH Sundulan, KPH Tuban)

Oleh :

Hakimuddin Hasibuan\*)

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Permasalahan**

Manusia mempunyai peranan yang sangat besar dalam masalah gangguan keamanan hutan. Kenyataan menunjukkan bahwa ancaman yang cukup serius terhadap hutan dan paling dominan adalah berasal dari penduduk yang berada di sekitarnya dan semakin disadari bahwa ancaman tersebut cenderung meningkat. Hal ini didorong oleh kondisi sosial ekonomi yang relatif masih rendah, kondisi lingkungan di sekitar hutan yang kurang menguntungkan dalam menunjang kehidupan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian hutan, serta masih lemahnya upaya pengelolaan hutan.

Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam rangka menanggulangi gangguan terhadap hutan tersebut adalah diselenggarakannya Program Perhutanan Sosial yaitu pada kawasan hutan yang rawan akibat tekanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan peran aktif masyarakat sekitar hutan khususnya para peserta dalam hal mengamankan dan melestarikan hutan beserta isinya sehingga pembangunan hutan berhasil dan gangguan terhadap hutan oleh masyarakat sekitar hutan dapat dikurangi dan ditanggulangi.

Mengingat penanggulangan gangguan keamanan hutan oleh masyarakat sekitar hutan adalah sasaran utama dan merupakan tujuan jangka panjang pelaksanaan program ini (dalam hal ini RPH Wangun) dan selama ini belum pernah diadakan penelitian tentang masalah keamanan hutannya maka perlu adanya penelitian tentang Program Perhutanan Sosial dan hubungannya dengan keamanan hutan.

- 
1. Mahasiswa S1 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di bawah bimbingan Ir. Hardjanto, MS dan Ir. Bambang S. Utomo, MDS

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial ditinjau dari aspek keamanan hutan. Cakupan bahasan dalam penelitian ini terutama dititikberatkan pada aspek kesejahteraan masyarakat khususnya rumahtangga pesanggem dan aspek keamanan hutan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RPH Wangun BKPH Sundulan KPH Tuban Perum Perhutanan Unit II Jawa Timur. Penelitian dilakukan selama tiga bulan (20 September s/d 20 Desember 1990).

### Metode Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Pengambilan sampel responden baik peserta bukan peserta Program Perhutanan Sosial dilakukan dengan metode acak sederhana dari satu desa. Penentuan desa/dukuh objek penelitian didasarkan pada pertimbangan jumlah peserta program terbanyak yang bertempat tinggal di desa/dukuh tersebut dan dengan memperhatikan intensitas interaksi antara masyarakat dengan hutan. Ukuran sampel yang dijadikan sebagai responden didasarkan atas hasil sampling pendahuluan dengan kriteria strata luas pemilikan lahan :

Strata I	luas pemilikan lahan	> 0.50 ha
Strata II	luas pemilikan lahan	0,26 - 0,50 ha
Strata III	luas pemilikan lahan	0,01 - 0,25 ha
Strata IV	luas pemilikan lahan	tunakisma.

Besarnya *error sampling* ditetapkan 10 % dengan selang kepercayaan 95 %.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Data juga diperoleh dengan metode observasi partisipasi dan wawancara bebas terhadap pejabat perhutani setempat dan instansi lain yang berkaitan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari Laporan Perhutani setempat, pemerintah desa, dan instansi terkait.

### Metode Analisis Data

Untuk mengetahui apakah kondisi keamanan hutan semakin membaik atau memburuk setelah dilaksanakannya Program Perhutanan Sosial dilakukan analisis dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh sebelum dan setelah dilaksanakan program. Data

mengenai keamanan hutan dalam penelitian ini meliputi 4 RPH yaitu RPH Wangun, RPH Sigagak, RPH Ngimbang dan RPH Kujang, dimana letaknya masih relatif dekat dengan lokasi proyek Program Perhutanan Sosial dan dengan desa Ngimbang. Tolok ukur penelitian keamanan hutan khususnya pencurian kayu antara lain : tingkat kerawanan pencurian, modus operandi pencurian, dan tingkat kesadaran masyarakat.

Untuk mempertajam hasil analisis, maka dilakukan pengujian statistika yaitu "Uji tanda" dengan sistim skoring terhadap jawaban responden.

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya rumahtangga pesanggem didekati berdasarkan jumlah pengeluaran total rumah-tangga per tahun. Standar penilaian tingkat kesejahteraan yang digunakan adalah garis kemiskinan Sayogyo (1977) dimana pengeluaran RT per kapita per tahun setara 320 kg beras merupakan garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan.

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata pendapatan petani peserta dengan bukan peserta Program Perhutanan Sosial, dilakukan pengujian statistika yaitu "Uji dwi-arah".

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN

### Aspek kesejahteraan Masyarakat

Rata-rata pendapatan rumahtangga responden untuk masing-masing stratum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Petani Responden.

Strata	Rp/Tahun		Kontribusi PS (%) +
	Peserta	bukan peserta	
I	1.630.266,67	892.812,50	62,48
II	1.736.187,50	731.416,67	54,71
III	933.733,33	546.750,00	64,28
IV	897.375,00	426.000.00	90,83
Rata-rata	1.344.521,67	806.341,67	70,11

\* Persentase pendapatan hasil usahatani Program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan total rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan keadaan masyarakat petani sebelum menjadi peserta program, adanya Program Perhutanan Sosial telah membawa dampak positif yang menggembirakan, yaitu telah berhasil meningkatkan pendapatan petani. Persentase kenaikan pendapatan petani setelah ikut sebagai peserta program adalah sebesar 140,82 %, dengan masing-masing untuk stratum I, II, III, dan IV adalah 166,29 %, 199,25 %, 91,67 %, dan 85,90 %.

Hasil pengujian ("uji dwi-arah") menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 4,189 > t_{tabel} = 2,576$ . Hal ini berarti secara rata-rata pendapatan petani peserta (yp.) berbeda nyata dengan rata-rata pendapatan petani bukan peserta Program Perhutanan Sosial (yb.) pada tingkat kepercayaan 99 % yaitu menuju ke arah kemajuan (yp. > yb.).

Jumlah pengeluaran rata-rata rumahtangga petani perkapita per tahun setara beras adalah sebesar 499,67 kg beras, dimana untuk masing-masing stratum I, II, III, dan IV adalah 471,16 kg, 561,62 kg, 690,43 kg, dan 418,54 kg.

Berdasarkan konsep garis kemiskinan Sayogyo (1977), maka rumah tangga pesanggem di RPH Wangun secara rata-rata berada jauh di atas ambang kecukupan kebutuhan fisik minimum yaitu mempunyai tingkat pengeluaran di atas nilai tukar 320 kg beras.

#### Aspek Keamanan Hutan

Jenis gangguan keamanan hutan di RPH Wangun dan sekitarnya antara lain : pencurian kayu, pencurian kayu bakar, penggembalaan liar, pembabatan tanaman muda dan kebakaran hutan. Gangguan terhadap hutan akibat tekanan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya yang paling menonjol dan sulit ditanggulangi hingga saat ini adalah pencurian kayu bakar. Namun jika dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan, maka kebakaran hutan dan pencurian kayu menempati urutan terbatas.

Ukuran tunggak beras pencurian yang terbanyak adalah dalam kisaran keliling 45-85 cm. Data ini menunjukkan bahwa pencurian kayu di RPH Wangun dan sekitarnya dilakukan secara perorangan. Frekwensi kejadian pencurian menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, penurunan tersebut lebih nyata lagi jika dilihat secara lokal yaitu khusus untuk RPH Wangun. Ini berarti adanya Program Perhutanan Sosial di RPH Wangun mempunyai dampak yang positif dalam hal upaya menanggulangi gangguan keamanan hutan oleh masyarakat sekitarnya.

Nilai kerugian tunggak secara ekonomi akibat pencurian hasil hutan di RPH Wangun adalah kecil sekali dan mengalami penurunan yang nyata setelah adanya Program Perhutanan Sosial di lokasi tersebut. Namun jika dilihat secara keseluruhan (di 4 RPH) intensitas gangguan keamanan hutan terlihat berfluktuasi dari

tahun ke tahun dengan kata lain belum menunjukkan penurunan yang nyata.

Secara umum gangguan keamanan hutan di RPH Wangun dan sekitarnya akibat pencurian sudah tergolong dalam tingkat wajar. Tingkat kerawannya lebih ringan dibanding situasi keamanan hutan di BKPH lain dalam KPH Tuban misalnya BKPH Merakurak. Berdasarkan kriteria penilaian menurut Mu'min (1982) dan Anonim (1982a), maka kerawanan keamanan hutan di wilayah BKPH Sundulan khususnya RPH Wangun dan sekitarnya adalah termasuk ke dalam katagori ringan, yaitu nilai kerugian dalam setiap gerakan pencurian < Rp 1.000.000,- dengan jumlah kerugian fisik maksimal 10 pohon, dilakukan oleh perorangan/kelompok kecil (5-10 orang) dan bersifat pasif.

Dari hasil wawancara, sebenarnya masyarakat sekitar hutan khususnya penduduk desa Ngimbang sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Mereka tahu bahwa mencuri kayu di hutan adalah perbuatan salah dan dapat dijatuhi hukuman. Biasanya mereka segera lari jika berhadapan dengan petugas dan tidak berani melakukan perlawanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekian terdakwa yang berhasil ditangkap, sebagian besar (85 %) adalah berasal dari penduduk desa di luar desa Ngimbang terlebih-lebih pada tahun-tahun terakhir setelah digalakkannya Program Perhutanan Sosial, para pelaku kejahatan pencurian sangat sedikit yang berasal dari desa Ngimbang atau hampir tidak ada. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pesanggem akan manfaat dan pentingnya hutan.

Motivasi masyarakat pesanggem untuk ikut sebagai peserta Program Perhutanan Sosial umumnya adalah atas kesadaran sendiri dan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak buat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sekitar 57 % dari responden pesanggem mempunyai mata pencaharian sebagai pencari kayu bakar atau perencek sebelum ikut kerja di hutan. Peranserta masyarakat sekitar hutan khususnya desa Ngimbang di dalam kegiatan Program Perhutanan Sosial sudah cukup besar. Hal ini terlihat terdapatnya 132 rumah tangga peserta program yang berasal dari desa Ngimbang atau 86 % dari seluruh peserta Program Perhutanan Sosial di RPH Wangun.

Hasil pengujian statistik "uji tanda" terhadap perubahan sikap, persepsi dan partisipasi para pesanggem dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dan Penanggulangan gangguan keamanan hutan menunjukkan bahwa  $\chi^2_{hitung} = 28,03 > \chi^2_{tabel} (0,01;1) = 6,63$ . Ini berarti bahwa Program Perhutanan Sosial ada pengaruhnya untuk menyadarkan masyarakat khususnya pesanggem dalam hal upaya penanggulangan gangguan keamanan hutan pada taraf uji 99 %. Hasil pengujian lanjut yaitu "uji pangkat bertanda wilcoxon" menunjukkan bahwa  $|Z|_{hitung} = 4,78 > Z_{tabel} (\alpha = 0,005) = 2,58$ . Berdasarkan hasil pengujian kedua uji di atas berarti Program

Perhutanan Sosial berpengaruh nyata terhadap peningkatan kesadaran (peran serta) masyarakat sekitar hutan khususnya pesanggem dalam hal upaya penanggulangan keamanan hutan pada tingkat kepercayaan 99 %.

Beberapa faktor yang mendorong timbulnya gangguan keamanan hutan di RPH Wangun dan sekitarnya antara lain :

1. Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang masih rendah
2. Sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan
3. Terdapatnya sindikat pemasaran kayu gelap.
4. Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan hutan.
5. Kelemahan di bidang peraturan perundangan.
6. Kurangnya disiplin hukum
7. Sarana komunikasi masih dirasakan sangat kurang
8. kurangnya intensitas pengawasan dan pembinaan dari atasan kepada bawahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Tingkat kesejahteraan rumah tangga pesanggem di RPH Wangun secara rata-rata berada di atas garis kemiskinan menurut ukuran Sayogyo (1977).

Tekanan terhadap hutan khususnya kawasan hutan RPH Wangun pada tahun-tahun terakhir ini (setelah digalakkannya Program Perhutanan Sosial) telah berkurang (membaik).

Intensitas gangguan keamanan hutan khususnya pencurian kayu di RPH Wangun dan sekitarnya telah berada dalam tingkat wajar atau ke dalam katagori ringan menurut Mu'min (1982).

Dengan adanya kegiatan Program Perhutanan Sosial maka peran serta masyarakat sekitar hutan khususnya peserta dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan hutan dapat ditingkatkan.

### Saran

Upaya penanggulangan gangguan keamanan hutan hendaknya memperhatikan faktor-faktor penyebab. Beberapa hal dan langkah yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pengarahan dan pendekatan yang lebih intensif terhadap masyarakat sekitar hutan oleh petugas Perum Perhutanan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personil Polsus Kehutanan
3. Meningkatkan keamanan/perondaan dan pengeledahan
4. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih baik.

